

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2014, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta:2014
- Adityo Susilo 'dkk'. 2020. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.7, No.1, Hal 45-67.
- Ait Novatiani,R. Wedi Rusmawan Kusumah, Diandra Pepi Vebian. 2019. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Widyatama Vol. 10, No. 1.
- Anita Firdaus, Suharno, Sunarti. 2020. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15, No. 3.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2007. *Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik*, cetakan ketiga. Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kemenerian/Bappenas.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Christian, Michael 'et al'. 2020. *Dampak Corona Virus Terhadap Ekonomi Global*. Perkembangan Ekonomi dan Kerja Sama Internasional, Edisi I. Artikel tersedia pada www.bi.go.id. diakses pada 30 Juni 2021.
- Deti Kumalasari. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 5, No. 11 ISSN 2460-0585.
- Dito Aditia Darma Nasution 'dkk'. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Benefita, Hal: 212-224.
- Fanny Jitmaw, Kalangi, Linda Lambey. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Fungsi Pemeriksaan Interen terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill, Universitas Sam Ratulangi, ejournal.unsrat.ac.id .
- Hasibuan, Malayu SP. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan keempatbelas*, Jakarta ,Penerbit : Bumi Aksara. Hal: 94
- Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa: Berbasis Pada Peraturan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Husein Umar. 2000. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. e-Jurnal Akuntansi Vol. 28, No. 1 ISSN 2302-8556.
- Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020. Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Dsease* 2019 (*Covid-19*).
- Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2020. Tentang Perubahan Atas Keptusuan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Dsease* 2019 (*Covid-19*).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 26 KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lucy Auditya, Husaini, Lismawati. 2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Journal Fairness Vol. 3, No. 1 ISSN 2303-0348.
- Made Budi Sastra Wiguna, Gede Adi Yuniartha, Nyoman Ari Surya Darmawan. 2015. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Derah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol.3, No. 1
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press. Hal: 17.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Matia Andriani. 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa*. e-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa Vol., 1 No. 2.
- Mayangsari Putri, sSuharno, Bambang Widarno. 2018. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Pengawasan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa*. Jurnal Akuntansi dan Ssitem Teknologi Informasi Vol. 14, No. 1.
- Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Surabaya: Ghalia. Indonesia.
- Mohamad Mahsun. 2014. *Pengaruh Kinerja Sektor Publik*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020. Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 /PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa.
- Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (1).
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020. Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Risya Umami, Idang Nurodin. 2017. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Vol. 6, Edisi 11 ISSN 20886969.

- Sarip 'dkk'. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 1, Hal: 10-20.
- Sudjana. 2000. *Metode Statistika*. Bandung: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-22. Bandung: Alfabeta.CV.
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. 2020. *Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Melalui Anggaran dan Belanja Desa*. Jakarta: Bina Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
- Undang- Undang RI Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1 huruf d tentang alokasi dana desa.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- www.kemenkeu.co.id Pemulihan Ekonomi Nasional dan Dana Desa.
- www.organisasi.org Daftar Nama Kecamatan Kelurahan/Desa Di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.
- Yuliana. 2020. *Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur*. Wellness and Healthy Magazine, Vol. 2, No. 1, Hal: 187-192.